

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, B. 2018. Pelayanan Publik. Bandung. Mangga Makmur Tanjung Lestari.
- Batinggi, A dan Ahmad, B. 2013. Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta. CV. Andi Offset (Penerbit Andi).
- Bungin, B. 2010. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Bungin, B. 2017. Penelitian Kualitatif. Jakarta. Kencana.
- Creswell, J. W. 2017. Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. dkk. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. 2015. Reformasi Birokrasi Kontekstual. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Hardiyansyah. 2017. Manajemen Pelayanan dan Pengembangan Organisasi Publik. Yogyakarta. Penerbit Gava Media.
- Hardiyansyah. 2018. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta. Penerbit Gava Media.
- Haryatmoko. 2019. Etika Publik. Yogyakarta. Penerbit PT Kanisius.
- Hehamahua, A. 2019. Integritas Menyemai Kejujuran, Menuai Kesuksesan dan Kebahagiaan. Yogyakarta. The Phinisi Press Yogyakarta.
- Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi, D. 2015. Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Bandung. Penerbit Alfabeta.

- Nawawi, H. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, R. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Purwanto, E.A. dan Sulistyastuti, D.R. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Gava Media.
- Priansa, D.J. 2017. *Manajemen Pelayanan Prima*. Bandung. Alfabeta.
- Ratminto dan Winarsih, A.S. 2016. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ratminto, *et.al.* 2017. *Pelayanan Prima*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Ripley, R.B. dan Rankin, G.A. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy. Second Edition*. Chicago, Illinois. The Dorsey Press.
- Sedarmayanti. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Siagian, S. P. 1994. *Patologi Birokrasi*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sinambela, L.P. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Soetopo, H. 2016. *Perilaku Organisasi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung. Alfabeta.
- Sumardjo, M dan Priansa, D.J. 2018. *Manajemen Pengembangan Sumberdaya Manusia*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Tamin, F. 2004. *Reformasi Birokrasi : Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*. Bandung. Penerbit Belantika.
- Uha, I.N. 2017. *Manajemen Perubahan*. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Wahab, S.A. 2016. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

- Wajdi, F. 2019. Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan. Malang. Setara Press.
- Wibowo. 2018. Budaya Organisasi. Depok. PT RajaGrafindo Persada.
- Widodo, J. 2018. Analisis Kebijakan Publik. Malang. Media Nusa Creative.
- Winarno, B. 2014. Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus. Jakarta. CAPS (*Center of Academic Publishing service*).
- Yusuf, A. Muri. 2019. Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Zakaria, M dan Mansyur, M. 2017. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung. Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Jurnal, Skripsi dan Thesis

- Agnes, A.F. 2017. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi. Universitas Lampung.
digilib.unila.ac.id/26082/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf. Diakses tanggal 19 Mei 2019.
- Amrullah, M.N, *et.al.* 2017. Kepemimpinan Pelayanan dan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Mewujudkan Birokrasi Pertanahan yang Bersih dan Berkinerja. Prosiding Seminar Nasional STIE AUB Surakarta. Diakses tanggal 26 Agustus 2019.
- Aristarini, L. *et.al.* 2014. Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi Sosial dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bagian Pemasaran PT. Adira Finance Singaraja. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014). Diakses tanggal 28 September 2019.
- Brilianto, I. 2016. Analisis pembangunan zona integritas dalam upaya peningkatan akuntabilitas, pelayanan publik dan pemberantasan korupsi (studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta).
http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=248. Diakses tanggal 19 Mei 2019.

- Caesaringi, I. 2017. Reformasi Birokrasi Kota Tegal (Studi Kasus Zona Integritas Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih BP2T dan RSUD Kardinah).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16668>. Diakses tanggal 19 Mei 2019.
- Ginting, R. dan Haryati, T. 2011. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2.
- Haning, M. T. 2018. Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 25-37.
- Kadir, Y. 2018. Membangun Zona Integritas dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Kabupaten Gorontalo.
<https://www.researchgate.net/publication/322700445>. Diakses tanggal 19 Mei 2019.
- Kairupan, J. K. 2015. Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/11386>. Diakses tanggal 19 Mei 2019.
- Lahiang, M. H. *et.al.* 2018. Analisis kendala-kendala yang dihadapi Satuan Pengawasan Internal dalam membangun Zona Integritas di RSUP Prof. Dr. R. D Kandou Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/download/19151/18709>. Diakses tanggal 19 Mei 2019.
- Martati, A. 2015. Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi sebagai Perwujudan Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/49272/Penyelesaian-sengketa-pertanahan-melalui-mediiasi-sebagai-perwujudan-peran-kantor-pertanahan-kabupaten-karanganyar-dalam-pelaksanaan-reformasi-birokrasi>. Diakses tanggal 21 Agustus 2019.
- Mosepa, H. A. *et.al.* 2018. Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang. Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 2 : 183 – 202.
- Mukti, A.D.W. 2011. Implementasi *Customer Relations* dalam Reformasi Birokrasi. <http://eprints.ums.ac.id/16148/>. Diakses tanggal 21 Agustus 2019.

- Nurhayati, *et.al.* 2018. Tinjauan Yuridis Penerapan Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jom/article/view/468>. Diakses tanggal 26 Agustus 2019.
- Purnomo, O.K. 2015. Upaya Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional (Studi Implementasi *One Day Service* di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul). http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=83910&obyek_id=4. Diakses tanggal 16 April 2019.
- Respationo, S. 2013. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. MMH, Jilid 42 No. 1.
- Samin, R. 2011. Reformasi Birokrasi. Jurnal FISIP UMRAH Vol. 2, No. 2,: 172 – 182.
- Suryanto, F. 2013. Pelayanan dan Mekanisme Informasi Publik (Studi di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Reformasi Birokrasi Indonesia). <https://lib.unnes.ac.id/17127/>. Diakses tanggal 21 Agustus 2019.
- Tairas, Novia Laury. 2004. Implementasi Program Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara (Studi Kasus di Desa Blongko, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan). Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Taufan. 2017. Implementasi Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2014 – 2016. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11892/Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=14&isAllowed=y>. Diakses tanggal 19 Mei 2019.
- Telaumbanua, N. G. 2018. Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Kementerian Agama Kota Medan. repository.usu.ac.id/handle/123456789/8491. Diakses tanggal 19 Mei 2019.
- Wahyuni, H.A *et.al.* 2016. Efektivitas Pelaksanaan *One Day Service* dalam Program *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional (Studi di Kantor Pertanahan Kota Depok). *Diponegoro Law Review* Volume 5 Nomor 2. Diakses tanggal 16 Agustus 2019.

Wardana, D. dan Meiwanda, G. 2017. Reformasi birokrasi menuju Indonesia baru, bersih dan bermartabat. *Wedana : Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*. Vol. III Nomor 1.

Wulan, R.R. dan Mustam, M. 2017. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16740/16079>. Diakses tanggal 26 Agustus 2019.

Yusuf, A.P. *et.al.* 2019. Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Maros. <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/1579>. Diakses tanggal 21 Agustus 2019.

Dokumen Resmi Pemerintah

Badan Pusat Statistik. Laporan SHPRB Kementerian/ Lembaga 2018. Jakarta.

Ombudsman RI. Laporan Tahunan 2018. Jakarta.

Peraturan

Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map reformasi Birokrasi 2015 – 2019.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Website

<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/tiga-unit-kerja-kementerian-atrbpn-peroleh-penghargaan-zona-integritas-77958>. Diakses tanggal 14 Mei 2019.

<https://www.inews.id/daerah/yogya/urus-sertifikat-tanah-warga-di-gunungkidul-dipungut-rp600-000/91419>. Diakses tanggal 14 Mei 2019.

<http://medan.tribunnews.com/2018/01/20/bpn-belum-reformasi-diri-urus-sertifikat-tanah-masih-berbelit-belit>. Diakses tanggal 14 Mei 2019.

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/inilah-penyelenggara-pelayanan-publik-terbaik-dari-pemerintah-pusat>. Diakses tanggal 27 Juni 2019.

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-akan-serahkan-205-penghargaan-unit-kerja-berpredikat-wbk-wbbm>. Di akses tanggal 14 Mei 2019.

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/resolusi-2019-kementerian-panrb-prioritaskan-enam-sasaran-reformasi-birokrasi>. Di akses tanggal 19 Mei 2019.

<https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-temukan-pungli-pengurusan-sertifikat-rumah-subsidi-di-jambi>. Diakses tanggal 14 Mei 2019.

<https://www.transparency.org/cpi2018>

<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/kementerian-atrbpn-sepakati-pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-63324>.
Diakses tanggal 26 September 2019.

<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/komitmen-dan-langkah-konkret-kementerian-agraria-dan-tata-ruangbadan-pertanahan-nasional-melanjutkan-agenda-reformasi-birokrasi-melalui-pembangunan-zona-integritas-68265>.
Diakses tanggal 26 September 2019.

<http://kot-bandung.atrbpn.go.id/en-us/Statistik/sosialisasi-rencana-kerja-pembangunan-zona-integritas-64709.aspx>. Diakses tanggal 26 September 2019.

<https://kbbi.web.id/komitmen>. Diakses tanggal 27 September 2019.

<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/penanganan-pengaduan-masyarakat-introspeksi-diri-untuk-pelayanan-publik-lebih-baik-82700>. Diakses tanggal 29 september 2019.